

## Bab VI

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 6.1 Strategi

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon Tahun 2013-2018, maka Pemerintah Kota Cirebon akan melaksanakannya melalui misi yang telah disusun dan strategi-strategi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang disusun disini adalah strategi terhadap masing-masing indikator sasaran dari pencapaian sasaran misi.

### 6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013-2018. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah kebijakan adalah untuk memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.

Adapun untuk memperjelas strategi dan arah kebijakan Kota Cirebon pada periode 2013-2018 pada Bab ini akan disajikan Strategi dan Arah Kebijakan terhadap masing-masing sasaran, indikator sasaran dan strategi terhadap masing-masing Misi Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013-2018 dalam bentuk matriks sebagaimana Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1  
Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Kota Cirebon 2013-2018

Misi 1. Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.1.1 Meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan pada aparatur pemerintahan	1.1.1.1 Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD	1.1.1.1.1 Pelaksanaan kegiatan keagamaan, pengawasan perilaku, sanksi, dan pelibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas akhlak dan moral aparatur	1.1.1.1.1.1 Mewajibkan instansi Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, menyusun pedoman pemberian sanksi, operasi rutin PNS di tempat-tempat hiburan dan membuka kota pengaduan masyarakat terhadap perilaku PNS

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.2.1 Meningkatnya kualitas sarana prasarana keagamaan	1.2.1.1 Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan seluruhnya.	1.2.1.1.1 Peningkatan pemberian bantuan kepada sarana peribadatan melalui hibah dan bansos serta kegiatan keagamaan	1.2.1.1.1.1 Meningkatkan pemahaman pengurus mesjid atau RW terhadap mekanisme hibah dan bansos serta pelibatan pengurus mesjid dalam kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan.
1.2.2 Terwujudnya prestasi Kota Cirebon dalam bidang keagamaan	1.2.2.1 Prestasi lomba keagamaan 3 besar tingkat provinsi	1.2.2.1.1 Pembinaan kepada generasi muda dalam lomba bidang keagamaan dan Pelaksanaan lomba secara berjenjang dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota	1.2.2.1.1.1 Pembinaan Keagamaan kepada generasi muda dalam bentuk lomba dan festival keagamaan berjenjang dari tingkat kelurahan hingga kota.
1.2.3 Terpeliharanya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing	1.2.3.1 Tidak adanya kasus konflik yang bernuansa agama	1.2.3.1.1 Peningkatan frekuensi dialog forum kerukunan umat beragama	1.2.3.1.1.1 Meningkatkan frekuensi dialog dalam rangka evaluasi kerukunan umat beragama

Misi 2. Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2.1.1 Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional	2.1.1.1 Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	2.1.1.1.1 Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah	2.1.1.1.1.1 Meningkatkan kompetensi aparatur melalui peningkatan keahlian dan keterampilan
	2.1.1.2 Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS	2.1.1.2.1 Penerapan reward dan punishment dalam disiplin PNS	2.1.1.1.1.2 Mengembangkan sistem kesejahteraan PNS berdasarkan penilaian kinerja serta memenuhi kebutuhan aparatur baik fungsional dan non fungsional sesuai dengan standar kebutuhan
2.1.2 Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD	2.1.2.1 Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di 2018	2.1.2.1.1 Optimalisasi pengelolaan aset daerah	2.1.2.1.1.1 Melakukan pembinaan disiplin PNS secara berkala, penerapan reward dan punishment, pengawasan disiplin, dan kotak pengaduan masyarakat
		2.1.2.1.2 Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	2.1.2.1.2.1 Melakukan penataan pengelolaan aset daerah dengan peningkatan kualitas kelembagaan aset, integrasi sistem, dan pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga
		2.1.2.1.3 Optimalisasi pengawasan dan pengendalian keuangan daerah	2.1.2.1.3.1 Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan optimalisasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2.1.2.2 Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan 100 %	2.1.2.2.1 Pelaksanaan proses perencanaan tepat waktu sesuai dengan ketentuan	2.1.2.2.1.1 Menyepakati jadwal waktu perencanaan dan penganggaran antara eksekutif dan legislatif serta mempublikasikannya.
		2.1.2.2.2 Peningkatan kualitas dokumen perencanaan SKPD	2.1.2.2.2.1 Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur perencana di setiap SKPD
			2.1.2.2.2.2 Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pembangunan daerah
		2.1.2.2.3 Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah	2.1.2.2.3.1 Membangun sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah serta mempublikasikan hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah.
2.1.3 Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah	2.1.3.1 Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan	2.1.3.1.1 Peningkatan jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan	2.1.3.1.1.1 Melakukan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada SKPD yang tertib arsip
	2.1.3.2 Meningkatnya arsip vital dan arsip statis	2.1.3.2.1 Penyediaan arsip dalam bentuk digital	2.1.3.2.1.1 Menyediakan dokumen arsip secara digital
2.1.4 Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan	2.1.4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perijinan	2.1.4.1.1 Optimalisasi kelembagaan pelayanan perijinan yang dilaksanakan dengan mudah, murah dan cepat sesuai dengan azas dan prinsip pelayanan	2.1.4.1.1.1 Penataan dan penguatan kelembagaan pelayanan perijinan, pembangunan sistem pelayanan perizinan online, serta penerapan insentif dan disinsentif informasi
	2.1.4.2 Meningkatnya nilai investasi di Kota Cirebon	2.1.4.2.1 Peningkatan iklim investasi yang kondusif	2.1.4.2.1.1 Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi 2.1.4.2.1.2 Meningkatkan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal
2.1.5 Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.1.5.1 Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan	2.1.5.1.1 Optimalisasi pengembangan pelayanan administrasi kependudukan	2.1.5.1.1.1 Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan
2.2.1 Terwujudnya kesesuaian struktur dan tatalaksana SKPD	2.2.1.1 Jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi, ketatalaksanaan 100% di 2018	2.2.1.1.1 Pengembangan struktur organisasi dan tata laksana yang akuntabel	2.2.1.1.1.1 Melakukan penataan kebutuhan organisasi dan sumberdaya aparatur berdasarkan prinsip good governance
2.3.1 Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan Kabupaten Cirebon	2.3.1.1 Seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU) disepakati 100 %	2.3.1.1.1 Pembangunan komunikasi dalam rangka penyelesaian batas daerah dengan Kabupaten Cirebon	2.3.1.1.1.1 Menyelesaikan penegasan batas daerah antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon
2.4.1 Penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi	2.4.1.1 Tersedianya peraturan-peraturan tentang egovernment 100%	2.4.1.1.1 Peningkatan dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi	2.4.1.1.1.1 Mengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan, membangun pustaka infrastruktur teknologi informasi, membangun pusat data (data center) yang terintegrasi antar instansi, Membangun sistem informasi sesuai dengan standar pengembangan dan penerapan egovernment
	2.4.1.2 Terpenuhinya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100%		

Misi 3. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3.1.1 Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam kebineka tunggal ika an	3.1.1.1 Menurunnya kejadian kriminalitas karena ras dan agama 0 kasus	3.1.1.1.1 Penyediaan fasilitas pemahaman wawasan kebangsaan	3.1.1.1.1 Meningkatkan peran lembaga SKPD/kecamatan/ Kelurahan dalam sosialisasi wawasan kebangsaan
3.2.1 Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum	3.2.1.1 Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum 15% setiap tahun dari 45 titik	3.2.1.1.1 Peningkatan peranserta dan kemitraan masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat	3.2.1.1.1 Meningkatkan jumlah kader masyarakat sadar hukum
			3.2.1.1.2 Mengintensifkan kegiatan siskamling serta memberikan reward kepada masyarakat dalam kegiatan siskamling
			3.2.1.1.3 Mengintensifkan patroli dan cegah tangkal gangguan Kantrantibmas
		3.2.1.1.2 Peningkatan intensitas kegiatan kepemudaan di lokasi rawan ketertiban umum	3.2.1.1.2.1 Pembinaan kerohanian bagi pemuda di lokasi rawan ketertiban umum
		3.2.1.1.2.2 Penyaluran minat dan bakat terhadap pemuda di lokasi rawan ketertiban umum	
3.3.1 Menurunnya tingkat pelanggaran perda	3.3.1.1 Tingkat pelanggaran perda turun 20% dari 30 Perda bisa ditegakkan	3.3.1.1.1 Peningkatan penanganan potensi pelanggaran Perda	3.3.1.1.1 Pemberdayaan masyarakat dan aparaturnya dalam sosialisasi dan penerapan perda
3.4.1 Terwujudnya RW K-3	3.4.1.1 Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50 %	3.4.1.1.1 Penilaian K-3 tingkat RW	3.4.1.1.1 Meningkatkan peran lembaga kelurahan dalam bermitra dengan masyarakat
3.5.1 Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan	3.5.1.1 Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan daerah rawan kecelakaan	3.5.1.1.1 Optimalisasi rekayasa, sosialisasi dan pengendalian lalu lintas dalam rangka mengurai titik rawan kemacetan dan kecelakaan	3.5.1.1.1 Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, pengendalian dan pengamanan lalu lintas, serta rekayasa terhadap perlintasan sebidang
		3.5.1.1.2 Mengoptimalkan standar keselamatan lalu lintas	3.5.1.1.2.1 Menerapkan standar pengujian kendaraan bermotor
		3.5.1.1.3 Peningkatan Keselamatan Pelayaran	3.5.1.1.3.1 Meningkatkan keselamatan pelayaran
		3.5.1.1.4 Menata sistem perparkiran yang sudah ada serta Menyediakan fasilitas parkir pada lokasi terpilih	3.5.1.1.4.1 Penerapan/perubahan geometris sistem parkir, Penerapan sistem perparkiran terpadu, parkir diluar badan jalan (off street) serta Menyediakan taman parkir di pusat-pusat kegiatan dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyediaan fasilitas gedung parkir.
3.6.1 Tertatanya sektor informal	3.6.1.1 Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan dibagi/jumlah PKL seluruhnya =0,3	3.6.1.1.1 Identifikasi, pembinaan dan pendampingan usaha bagi PKL serta penyediaan ruang bagi PKL	3.6.1.1.1 Melakukan pendataan dan pendaftaran PKL, serta pemberdayaan PKL melalui pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, peningkatan jaringan dan promosi pemasaran serta penyediaan ruang bagi PKL
3.7.1 Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana	3.7.1.1 Tingkat waktu tanggap kejadian bencana dan waktu tanggap darurat bencana	3.7.1.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	3.7.1.1.1 Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di lokasi rawan bencana

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3.7.1.1.2 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan masyarakat terhadap tanggap darurat bencana	3.7.1.1.2.1 Memberikan bimbingan teknis tanggap darurat bencana di tingkat kelurahan dan kecamatan

Misi 4. Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4.1.1 Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan	4.1.1.1 Meningkatnya Lama Harapan Sekolah pada usia max 18 tahun	4.1.1.1.1 Pemberian kesempatan kepada usia sekolah mengikuti pendidikan sesuai jenjangnya	4.1.1.1.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan 12 Tahun melalui BOP, Penyediaan Buku Mata Pelajaran dan LKS serta sarana prasarana pendidikan dan Beasiswa bagi siswa Berprestasi
			4.1.1.1.2 Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah
		4.1.1.1.2 Peningkatan mutu tenaga pendidik	4.1.1.1.2.1 Meningkatkan penyelenggaraan guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah
	4.1.1.2 Rata - rata lama sekolah (13 Tahun)	4.1.1.2.1 Pengembangan pendidikan non formal dan informal	4.1.1.2.1.1 Mengembangkan kawasan percontohan pendidikan nonformal dan informal ditingkat RW
			4.1.1.2.1.2 Mengembangkan kawasan percontohan perpustakaan ke tingkat RW dan Kelurahan
	4.2.1 Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat	4.2.1.1 Angka harapan hidup 71,1 tahun	4.2.1.1.1 Pemberdayaan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat
4.2.1.1.1.2 Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Sehat di masyarakat			
4.2.1.1.2 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas			4.2.1.1.2.1 Menyediakan jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh warga Kota Cirebon
			4.2.1.1.3 Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas
			4.2.1.1.3.2 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Lanjutan
			4.2.1.1.3.3 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan khusus Kelas III
4.2.2 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	4.2.2.1 Meningkatnya Peserta KB Aktif 75% di tahun 2018 dari jumlah PUS	4.2.2.1.1 Pengendalian kelahiran	4.2.2.1.1.1 Mengendalikan kelahiran dan pendewasaan perkawinan
4.3.1 Berprestasi di tingkat propinsi	4.3.1.1 Meraih posisi 10 besar tingkat propinsi di tahun 2018	4.3.1.1.1 Pembinaan atlit berprestasi	4.3.1.1.1.1 Melakukan pembinaan atlit berprestasi melalui pembibitan sejak dini dan pemberian penghargaan
		4.3.1.1.2 Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana olah raga	4.3.1.1.2.1 Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana olah raga

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4.4.1 Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan	4.4.1.1 Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012	4.4.1.1.1 Penetapan kalender budaya	4.4.1.1.1 Melakukan pembinaan aktivitas sanggar seni serta meningkatkan event pagelaran budaya khas Cirebon dan menjadikan Kota Cirebon sebagai pusat Event Budaya Khas Cirebon se Wilayah Cirebon, dengan meningkatkan dukungan dan keterlibatan Keraton.
	4.4.1.2 Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 Jenis (72 bangunan cagar budaya di th 2012)	4.4.1.2.1 Penataan bangunan cagar budaya serta revitalisasi pusaka cagar budaya	4.4.1.2.1 Melakukan penataan /revitalisasi bangunan cagar budaya, pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian pusaka cagar budaya, dan kerjasama dengan pemilik cagar budaya dalam upaya pelestarian
4.5.1 Meningkatnya indeks daya beli masyarakat	4.5.1.1 Indeks daya beli dari 62,35 menjadi 65 point	4.5.1.1.1 Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan TRIBINA (Manusia, Usaha dan Lingkungan)	4.5.1.1.1.1 Meningkatkan pembinaan teknis dan manajemen terhadap koperasi dan UMKM
			4.5.1.1.1.2 Meningkatkan fasilitasi permodalan antara UMKM/koperasi dengan lembaga keuangan
		4.5.1.1.2 Peningkatan kualitas keterampilan tenaga kerja	4.5.1.1.2.1 Meningkatkan kompetensi BLK
			4.5.1.1.2.2 Melaksanakan pelatihan keterampilan kerja yang berorientasi pada penempatan langsung
		4.5.1.1.3 Peningkatan keterampilan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja	4.5.1.1.3.1 Meningkatkan perlindungan tenaga kerja
			4.5.1.1.3.2 Meningkatkan pencari kerja yang ditempatkan
	4.5.1.1.4 Peningkatan sistem distribusi, stabilisasi dan cadangan pangan	4.5.1.1.4.1 Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan	
		4.5.1.1.4.2 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan	
	4.5.1.1.3.3 Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergi dan partisipatif		
	4.5.1.2 Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018	4.5.1.2.1 Peningkatan promosi wisata	4.5.1.2.1.1 Meningkatkan promosi wisata budaya khas Cirebon melalui pengembangan ekonomi kreatif
4.6.1 Menurunnya jumlah KK miskin	4.6.1.1 rasio KK miskin dibandingkan dengan KK kota dari 30,24% menjadi 25%	4.6.1.1.1 Peningkatan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan	4.6.1.1.1.1 Menyediakan satu data keluarga miskin
			4.6.1.1.1.2 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan
		4.6.1.1.2 Peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin	4.6.1.1.2.1 Menyediakan akses pelayanan pendidikan berupa Beasiswa rawan DO
			4.6.1.1.2.2 Memberikan akses pendampingan pelayanan kesehatan rujukan
			4.6.1.1.2.3 Menyediakan akses pelayanan air bersih, sanitasi, dan listrik bagi keluarga miskin

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			4.6.1.1.2.4 Menyediakan perbaikan rumah tidak layak huni dengan program bedah rumah
			4.6.1.1.2.5 Menyediakan akses pelayanan pangan dan gizi
		4.6.1.1.3 Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin	4.6.1.1.3.1 Melaksanakan pelatihan, pembentukan kelembagaan ekonomi mikro berbasis mesjid, dan pendampingan usaha ekonomi keluarga miskin
4.7.1 Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	4.7.1.1 Jumlah kasus dari 30 kasus menjadi 20 kasus	4.7.1.1.1 Peningkatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	4.7.1.1.1.1 Mengoptimalkan fungsi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
			4.7.1.1.1.2 Mengembangkan kawasan-kawasan percontohan Rukun Warga Layak Anak
4.8.1 Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	4.8.1.1 Penurunan PMKS 5 % di tahun 2018	4.8.1.1.1 Penanganan PMKS	4.8.1.1.1.1 Mengoptimalkan fungsi panti-panti pelayanan sosial
4.9.1 Terpenuhinya kesetaraan gender	4.9.1.1 Rasio gender diatas 30% perempuan	4.9.1.1.1 Penyajian data terpisah	4.9.1.1.1.1 Meningkatkan peran dan keterwakilan Gender disetiap kegiatan pembangunan

Misi 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5.1.1 Meningkatnya Proporsi Pembiayaan Pembangunan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan	5.1.1.1 Persentase kenaikan nilai Musrenbang Kecamatan yg diakomodir dalam APBD sebanyak 5 % sampai akhir tahun 2018 (kumulatif)	5.1.1.1.1 Peningkatan kualitas hasil musrenbang kecamatan	5.1.1.1.1.1 Membentuk fasilitator musrenbang untuk tiap kelurahan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian hasil musrenbang
5.1.2 Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat dalam Stimulan / Bantuan RW	5.1.2.1 Prosentase Swadaya Masyarakat sebesar 10 % terhadap jumlah bantuan RW	5.1.2.1.1 Memberikan reward terhadap partisipasi masyarakat	5.1.2.1.1.1 Melaksanakan kompetisi partisipasi masyarakat khususnya bantuan RW

Misi 6. Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
6.1.1 Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat serta areal permakaman	6.1.1.1 luas ruang terbuka hijau publik menuju 12 % pada akhir tahun 2018	6.1.1.1.1 Peningkatan ruang terbuka hijau publik	6.1.1.1.1.1 Menambah RTH publik melalui pembebasan lahan baru atau memanfaatkan aset milik pemerintah, optimalisasi area sempadan jalan, sungai dan laut serta ruang terbuka lainnya melalui penanaman pohon sebagai peneduh dan penguatan kelembagaan yang menangani asset fasos/fasum dalam rangka peningkatan RTH

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
6.1.2 Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup	6.1.2.1 Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH (rata-rata outcome)	6.1.2.1.1 Penyediaan data dan informasi serta instrument SDA dan LH secara berkesinambungan	6.1.2.1.1.1 Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penyediaan informasi SDA dan lingkungan hidup, konservasi dan pelestarian fungsi atmosfer, penanganan tanah timbul dan kerusakan ekosistem di wilayah pesisir dan laut
	6.1.2.2 Prosentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Baku Mutu Lingkungan (jumlah pelaku usaha yang taat terhadap baku mutu lingkungan dibagi jumlah pelaku usaha yang dipantau di kali 100%)	6.1.2.2.1 Penerapan instrument pengendalian dan pengawasan pencemaran, perusakan lingkungan	6.1.2.2.1.1 Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penerapan ijin lingkungan, Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan dan tepat guna, uji emisi dan kadar polusi.
	6.1.2.3 Meningkatnya pelayanan konservasi SDA (Rata-rata Outcome)	6.1.2.3.1 Pengendalian pelaksanaan konservasi SDA	6.1.2.3.1.1 Mengendalikan perusakan dan konservasi SDA melalui pemantauan pemanfaatan SDA dan perubahan iklim
	6.1.2.4 Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (rata-rata outcome)	6.1.2.4.1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	6.1.2.4.1.1 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan LH melalui bank Sampah, Green Office, Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Adipura
6.1.3 Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA	6.1.3.1 Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80%	6.1.3.1.1 Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	6.1.3.1.1.1 Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan melalui peran serta masyarakat (3R, RW Zero Waste) dan penyediaan sarana prasarana, kerjasama pelayanan persampahan serta penggalangan CSR, meningkatkan TPA Kopiluhur menjadi Sanitary Landfill, meningkatkan koordinasi regional dalam rangka TPA regional
6.2.1 Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat	6.2.1.1 Proporsi jalan dalam kondisi baik 100%	6.2.1.1.1 Pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jembatan dengan prioritas wilayah selatan dan perbatasan	6.2.1.1.1.1 Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan dan Jembatan serta penyediaan sistem informasi data base jalan dan jembatan, mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan
	6.2.1.2 Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100 %		
6.2.2 Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim	6.2.2.1 Berkurangnya Titik Rawan Genangan Banjir dari 18 titik menjadi 10 titik	6.2.2.1.1 Pengembangan sarana dan prasarana drainase	6.2.2.1.1.1 Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana drainase primer dan sekunder
		6.2.2.1.2 Pemeliharaan sarana prasarana drainase	6.2.2.1.2.1 Melaksanakan Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase primer dan sekunder
		6.2.2.1.3 Konservasi sumberdaya air	6.2.2.1.3.1 Menahan air permukaan selama mungkin di darat melalui pembangunan waduk/situ/embung, tangkapan air di hulu/sumur resapan dan lubang biopori serta konservasi air tanah



Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
6.2.3 Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal	6.2.3.1 Cakupan pelayanan air limbah domestik 92% menjadi 100%	6.2.3.1.1 Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan setempat	6.2.3.1.1.1 Meningkatkan cakupan layanan air limbah sistem terpusat melalui pembangunan perpipaan dan IPAL sistem terpusat serta mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman melalui Pembangunan IPAL (Sanitasi) komunal, sosialisasi penggunaan septic tank standar lingkungan hidup, dan melalui pembangunan/peningkatan IPAL sistem setempat.
	6.2.3.2 Jumlah jamban dan septiktank 76, 45 % (65.766 Rumah Tangga)		
6.2.4 Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Minum	6.2.4.1 Cakupan pelayanan air minum non perpipaan	6.2.4.1.1 Pengembangan dan peningkatan sistem air minum non perpipaan dengan prioritas wilayah selatan dan perbatasan	6.2.4.1.1.1 Mengembangkan sistem penyediaan air minum non perpipaan melalui Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku
6.3.1 Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	6.3.1.1 Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 0 kasus	6.3.1.1.1 Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif	6.3.1.1.1.1 Mewujudkan sistem integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang serta meningkatkan pengendalian terhadap upaya pemanfaatan ruang di wilayah selatan.
			6.3.1.1.1.2 Pemberian akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang melalui sistem informasi, media cetak, media elektronik dan tempat tempat lain yang mudah diketahui.
6.4.1 Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	6.4.1.1 berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh 20 %	6.4.1.1.1 Penataan lingkungan kawasan permukiman kota	6.4.1.1.1.1 Menata lingkungan permukiman dan meningkatkan penyediaan fasilitas umum dan jalan alternatif ke kawasan pengembangan perumahan.
6.4.2 Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	6.4.2.1 Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni menjadi 10.000 rumah	6.4.2.1.1 Pengembangan rumah sehat sederhana	6.4.2.1.1.1 Menyediakan rumah sehat sederhana yang layak huni dan superblok rumah susun sewa dan milik yang murah (untuk mendekati tempat tinggal dengan tempat kerja) pada lokasi pasar, sarana kesehatan dan lainnya.
6.4.3 Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	6.4.3.1 Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum	6.4.3.1.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan	6.4.3.1.1.1 Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang menggunakan teknologi tinggi dan tepat guna, Membangun Sistem Angkutan Umum Massal, Meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan umum melalui Peremajaan armada bus sedang, Penambahan dan Penataan Trayek, Penataan tempat pemberhentian angkutan umum serta pelayanan angkutan hari-hari besar
			6.4.3.1.1.2 Meningkatkan kualitas dan fasilitas terminal, bandara, jembatan timbang, JPO, Pejalan Kaki, penyandang disabilitas dan pemakai sepeda

